PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI KOTA BEKASI (STUDI DI WILAYAH HUKUM KOTA BEKASI)

OLEH

RENDY DWI PUTRA

E1A012190

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia tidak pernah menurun secara signifikan. Maraknya korupsi muncul karena pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini terlalu mengedepankan proses pidana represif dan kurang mengedepankan pencegahan. Kejaksaan Negeri Kota Bekasi memiliki tanggung jawab dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah Kota Bekasi. Kota Bekasi merupakan daerah kota berkembang dan memiliki banyak proyek pembangunan daerah yang memiliki ptensi terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian melalui kepustakaan maupun penelitian lapangan.

Tujuan penelitian ini untuk megetahui upaya apa yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk mencegah tindak pidana korupsi serta mengkaji hambatan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian bahwa upaya Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dalam melakukan pencegahan tindak pidan korupsi yaitu dengan upaya preventif, represif, dan edukatif. Upaya represif dengan berupa penindakan terhadap perkara korupsi, preventif dengan pembentukan Tim pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), dan edukatif dengan melaksanakan kegiatan Penerangan/Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Tertib Hukum (BINMATKUM). Faktor penghambat pencegahan tindak pidana korpsi di Kejakasaan Negeri Kota Bekasi meliputi faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor saran dan fasilitas pednukung, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Kata Kunci : Kejaksaan, Pencegahan, Tindak Pidana Korupsi, TP4D

ABSTRACT

In Indonesia, the case of corruption has never seignificantly declinde. The increase of corruption cases happens to be the rsult of repressive legal process enforced in corruption eradication instead pf prevention. State Court Of Bekasi in this Case is responsible to eradicating and preventing corruption criminal act in the region of Bekasi. The regency of Bekasi is a Developing region where projects of regional development and construction are numerous so corruption criminal act is very potential to happen. In this case, questions rise on how the attorney of Bekasi State Court prevent corruption criminal act. This research has been conducted with the method of sociological judical approach, which includes both library and field study.

The purpose of this research is to find out the efforts employed by state attorney of Kota Bekasi in preventing corruption criminal act incudes preventive, repressive and educative efforts. Repressive effort constitutes criminalization of corruption case, preventive effort contitutes the forming of "Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah" (Safeguard and Supervision Team Over Government and Regional Development), and educative effort contitutes legal eludication/ilumination that includes the program of founding legally ordered society (BINMATKUM). The obstaces within these efforts in preventing corruption criminal act by state attorney of Kota Bekasi includes legal factor, legal enforcement officers, supporting facility and medium, society and culture.

Keywords : Attorney, Prevention, Criminal act of corruption, TP4D